

## **How To Establish and Operate a Joint Venture Company In Indonesia**

**Dibuat oleh:**

**Nama: Rayhan Syah Wahyu Wijaya**

**Nim: 212040100023**

**Prodi: Ilmu Hukum Semester 4/ A1**

**Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

### **Pendahuluan**

Buku ajar hukum perusahaan yang ditulis oleh M. Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih memuat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan umum mengenai perusahaan, hal tersebut dibuktikan dengan substansi yang ada didalam buku ajar tersebut. Salah satu poin yang diambil penulis dalam membuat karya tulis ini adalah di bagian pendirian perusahaan yang dimana hal itu sejalan dengan judul yang diangkat. Dari gambaran tersebut penulis dapat menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan ketika membuat suatu Joint Venture Company di Indonesia. Buku ajar perusahaan tersebut memiliki 216 halaman secara keseluruhan yang diterbitkan oleh UMSIDA press dan dicetak pada Februari 2023.

Buku tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi mendalam mengenai suatu perusahaan, buku ajar tersebut juga dapat memungkinkan kita untuk mempelajari pemikiran atau sudut pandang orang lain terkait dengan substansi yang dimuat didalamnya, hal itu dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai suatu hal. Dengan membaca buku ajar perusahaan tersebut dapat membantu kita untuk berkembang dan meningkatkan intelektualitas diri, karena dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan analisis. Buku tersebut dapat diakses dengan mudah dan dapat dibawa ke mana saja. Dengan perkembangan teknologi, buku tersebut tersedia dalam bentuk digital, memungkinkan kita untuk membaca melalui e-book atau aplikasi buku elektronik. Buku dalam format digital memudahkan aksesibilitas dan memungkinkan kita untuk membawa koleksi buku dalam satu perangkat.

Dari beberapa sumber mengenai Joint Venture Company bisa dibilang perusahaan tersebut berperan penting dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Joint venture atau sering disebut dengan Perusahaan patungan dimana para pihak mengadakan perjanjian kerja sama patungan dalam bentuk modal. Joint venture oleh para ahli sering disebut dengan istilah *verzamelnaam* yang digunakan sebagai istilah berbagai bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing. Dalam hal mendirikan serta mengoperasikan perusahaan patungan telah diapaparkan dibawah ini.

## **Tahapan 1**

### **Proses penentuan mitra yang akan diajak bekerja sama**

- Mencari dan mengamati potensi dari mitra yang akan diajak bekerja sama yang sekiranya dapat membantu untuk mencapai tujuan.
- Mengamati serta mempelajari aspek kredibilitas maupun reputasi dari mitra yang akan diajak bekerja sama.
- Berdiskusi dengan mitra untuk mencari kesepakatan serta memahami hak dan kewajiban tiap pihak.<sup>1</sup>

## **Tahapan 2**

### **Pembuatan kontrak atau perjanjian**

Membuat perjanjian atau kontrak kerjasama dengan mitra sesuai kesepakatan yang telah dicapai di tahapan satu, dalam membuat kontrak jangan lupa untuk melibatkan ahli hukum atau pengacara yang ahli dalam bidangnya.<sup>2</sup>

## **Tahapan 3**

### **Pendirian perusahaan**

- Menentukan bentuk perusahaan apa yang akan didirikan.
- Memilih nama perusahaan dan mengeceknya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Domisili perusahaan harus jelas.
- Maksud dan tujuan perusahaan.
- Mendaftarkan perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem yang ada saat ini.<sup>3</sup>

### **Modal, Kepemilikan, Dokumen Pelengkap, dan Operasional**

- Membuat struktur permodalan, menentukan jumlah modal yang akan disumbangkan oleh masing-masing mitra dan perincian atas kepemilikan saham.
- Menyiapkan modal sesuai dengan kesepakatan dan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Memastikan persyaratan modal untuk jenis perusahaan patungan yang dipilih telah terpenuhi.
- Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, anggaran dasar, perjanjian kerja sama, NPWP, SKDU, dan dokumen identitas pribadi dan bukti alamat para pendiri perusahaan.
- Memastikan semua dokumen telah diverifikasi dan disahkan oleh notaris atau lembaga yang berwenang.
- Memeriksa dan memenuhi semua persyaratan izin dan lisensi yang sesuai untuk industri atau sektor usaha yang akan beroperasi.
- Mengajukan permohonan izin dan lisensi yang diperlukan kepada otoritas terkait.

---

<sup>1</sup> (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada & Jumalan, 2018)

<sup>2</sup>(Paulin, 2021)

<sup>3</sup> (Sukananda & Mudiparwanto, n.d.)

## Operasional

- Menetapkan struktur manajemen yang jelas dan bagan perusahaan.
- Mematuhi semua ketentuan perpajakan, ketenagakerjaan, dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.
- Tata kelola perusahaan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik.
- Menjalin komunikasi secara teratur dengan mitra serta memastikan kerjasama yang baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional.<sup>4</sup>

## Simpulan

Joint Venture identik dengan bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing. Dalam mendirikan dan mengoperasikan suatu perusahaan joint venture ada beberapa tahap yang harus diperhatikan yaitu tahap penentuan mitra, pembuatan kontrak atau perjanjian, pendirian perusahaan, modal, kepemilikan, kelengkapan dokumen, dan yang terakhir adalah operasionalnya. Perlu diketahui bahwa mekanisme ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, sektor industri, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi lebih baik berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang tepat mengenai proses pendirian dan pengoperasian perusahaan patungan di Indonesia.

## Referensi

1. M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202-202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
2. Hasanudin, M. (n.d.). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.
3. Paulin, S. T. (2021). PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 267–282. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.5>
4. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, & Jumalan, R. (2018). SINKRONISASI PENGATURAN JOINT VENTURE AGREEMENT DAN ANGGARAN DASAR DALAM PERUSAHAAN PATUNGAN. *JURNAL BINA MULIA HUKUM*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>
5. Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (n.d.). PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BENTUK PERUSAHAAN JOINT VENTURE DI INDONESIA.

---

<sup>4</sup> (Hasanudin, n.d.)